PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
INSPEKTORAT DAERAH
Jl. Bonto No. 1, Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telp. (0414) 21144, Faximile (0414) 22661

Benteng, 31 Juli 2024

Yth. Kepala Badan Perencanan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kab. Kepulauan Selayar
cq. Kepala Bidang Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan
di,-
Tempat

SURAT PENGANTAR
Nomor: 045.2 / 233 /VII/2024/ITDA

NO	NASKAH DINAS / BARANG YANG DIKIRMKAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Rancangan Akhir (Rankhir) Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025	1 (satu) rangkap	Memenuhi Permintaan Surat Bupati Kepulauan Selayar, Nomor: 050/770/VII/2024/ Bappelitbanda, tanggal 29 Juli 2024. Dikirim dengan hormat untuk bahan seperlunya

Diterima tanggal, 02 Agustus 2024

Penerima
Jabatan:

Nama : Hutawalim
Pangkat/Gol :
NIP :

Pengirim
INSPEKTUR DAERAH,

IRWAN BASO, S.STP.
Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b
NIP : 19800422 199912 1 003

Nomor Telepon: 0811 4221 456

RANCANGAN AKHIR
(R A N K H I R)

RENCANA KERJA
(R E N J A)
Tahun 2025

INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Benteng, 31 Juli 2024

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, itulah kata pujian yang sepantasnya diucapkan dalam mengawali pengantar ini, karena atas hidayah dan taufik-Nya sehingga Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Akhir (Rankhir) Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025, sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Renstra Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam aspek perencanaan pembangunan daerah, yang memuat Kebijakan, Program-Program dan Kegiatan indikatif Inspektorat Daerah selama tahun berjalan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat.

Dengan disusunnya Rankhir Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 ini diharapkan Inspektorat dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berkelanjutan, efektif, efisien dan akuntabel.

Tersusunnya Rencana Kerja ini tidak terlepas dari partisipasi semua pihak yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, besar harapan kami agar Rencana Kerja ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan yang memerlukannya sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerjanya.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Rencana Kerja ini masih banyak terdapat kekurangan yang perlu mendapat perbaikan kedepannya, namun demikian dengan segala kekurangan dan keterbatasan ini, kami berharap dapat menyajikan kebijakan, program dan kegiatan yang akan kami buat mengacu kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025.

Akhir kata semoga Rankhir Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 ini bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Aamiin.

Demikian, dan terima kasih.

Benteng, 31 Juli 2024

INSPEKTUR DAERAH,

IRWAN BASO, S.STP.

Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b

NIP : 19800422 199912 1 003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL vi

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 7
1.4 Sistematika Penulisan 8

BAB II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2023 10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah 10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah .. 24
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 53
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD 56
2.5 Penelaaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 69

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 79
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 79
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 84
3.3 Program dan Kegiatan 86

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 102

BAB V PENUTUP 119

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Kepulauan Selayar	15
Tabel 2.2	Pencapain Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.....	26
Tabel 2.3	Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Kepulauan Selayar.....	59
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Kepulauan Selayar	73
Tabel 3.1	Komparasi Capaian Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Terhadap Sasaran Inspektorat Daerah Provinsi dan Kementerian Dalam Negeri	82
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Kepulauan Selayar.....	90
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar	103

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah merupakan dokumen perencanaan Inspektorat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat urusan, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, lokasi, target capaian, kebutuhan dana (pagu indikatif), sumber dana dan catatan penting serta perkiraan maju rencana tahun selanjutnya (N+1) sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Lampiran dengan Huruf C terkait Tata Cara Penyajian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Dokumen Rencana Perangkat Daerah, **C.5 Penyajian Dokumen Renja**.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang mengamanatkan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra OPD. Renstra OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman

pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyebutkan bahwa Renstra OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Dalam prosesnya, penyusunan Rancangan Akhir (Rankhir) Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Rankhir Renja Inspektorat didalamnya menetapkan tujuan dan sasaran pengawasan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tepat waktu, dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu penyusunan Renja Inspektorat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi *eksisting* Inspektorat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Inspektorat Daerah.

Selain itu dengan disusunnya Rencana Kerja Inspektorat Daerah ini diharapkan dapat terpantau dan terevaluasi sampai sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra). Renja adalah penjabaran operasional dari Renstra untuk mencapai sasaran tahunan yang mendukung tujuan jangka panjang. Renja juga menjabarkan program-program dari Renstra menjadi kegiatan-kegiatan tahunan yang spesifik, termasuk anggaran, sumber daya, dan jadwal pelaksanaan. Sehingga dapat dilakukan koreksi jika terjadi penyimpangan ataupun perkembangan baru di lingkungan strategis yang perlu ditindaklanjuti atau diantisipasi pada Tahun 2025.

Rankhir Renja Inspektorat Daerah dan Renja Inspektorat Jenderal atau Renja Inspektorat Provinsi adalah dua dokumen

perencanaan yang berfungsi dalam lingkup pengawasan yang berbeda tetapi saling terkait. Renja Inspektorat dan Renja Inspektorat Jenderal saling mendukung dalam rangka menciptakan sistem pengawasan internal yang efektif dan efisien di seluruh tingkatan pemerintahan. Inspektorat Jenderal memberikan arahan dan supervisi kepada Inspektorat daerah, sementara Inspektorat daerah melaksanakan pengawasan yang lebih rinci dan spesifik di wilayah kerjanya masing-masing, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara dan daerah.

Rencana Kerja Tahunan ini digunakan dalam membuat rencana operasional kegiatan sebagai komitmen Pimpinan untuk menyediakan sumber daya serta proses penganggaran yang selanjutnya juga digunakan untuk *Service Agreement* atau Komitmen Kinerja ataupun *Performance Agreement* yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar untuk pemantauan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan di Tahun 2025.

Sesuai amanat tersebut maka Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rankhir Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2025. Rencana Kerja merupakan wujud tindak lanjut upaya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar terpilih.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesian Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1032);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 103);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 96, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 130);
21. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 504);
22. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 786);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2025 adalah untuk menentukan dan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, kegiatan/sub kegiatan dan indikatif besarnya anggaran yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah serta sebagai wadah sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan

mengutamakan isu-isu strategis Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:

a. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang berdasarkan pada anggaran berbasis kinerja sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
b. Tersusunnya program dan kegiatan pengawasan yang tepat sasaran, berbasis risiko, dan berprioritas tinggi sehingga pengawasan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah
c. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan organisasi
d. Untuk menentukan prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan acuan dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik *(Good Governance).*

1.4. Sistematika Penulisan

Rumusan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ini dituangkan ke dalam 4 (empat) Bab, secara ringkas sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang;
1.2. Landasan Hukum;
1.3. Maksud dan Tujuan;
1.4. Sistematika Penulisan;

BAB II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah;
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah;
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Inspektorat Daerah;

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD;

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;

BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah;

3.3. Program dan Kegiatan;

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan evaluasi terhadap pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja.

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra sampai dengan Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024 Inspektorat Daerah

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja outcome program ini ada 2 (dua) yaitu Persentase Capaian Kinerja dan Persentase Capaian Keuangan.

Pada Tahun 2022, indikator persentase capaian kinerja ditargetkan sebesar 63,03% dan terealisasi sebesar 63,03% sedangkan untuk indikator persentase capaian keuangan yang ditargetkan sebesar 83% terealisasi sebesar 81,69%.

Pada Tahun 2023, indikator persentase capaian kinerja ditargetkan sebesar 70,28% dan terealisasi sebesar 67,83% sedangkan untuk indikator persentase capaian keuangan yang ditargetkan sebesar 85% terealisasi sebesar 80,79%.

Untuk Tahun 2024, Target Renstra pada indikator persentase capaian kinerja ditargetkan sebesar 70,53% dan indikator persentase capaian keuangan ditargetkan sebesar 88% dan perkiraan Tingkat Capaian Realisasi adalah 100% untuk kedua indikator capain tersebut.

2) Program Penyelenggaraan Pengawasan

Indikator kinerja outcome program ini adalah Peningakatan Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Level Kapabilitas APIP dinilai berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada Tahun 2022 adalah Level Kapabilitas APIP ditargetkan berada pada Level 3 (tiga) dan terealisasi pada Level 2 (dua) dengan nilai 2,11.

Pada Tahun 2023 adalah Level Kapabilitas APIP ditargetkan berada pada Level 3 (tiga) dan terealisasi pada Level 2 (dua) dengan nilai 2,81.

Untuk Tahun 2024, Level Kapabilitas APIP ditargetkan berada pada Level 3 (tiga) dan perkiraan Tingkat Capaian Realisasi adalah Kapabilitas APIP Level 3 (tiga).

3) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah Nilai/Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Nilai SPIP diperoleh berdasarkan Hasil Penilaian Cepat (*baseline*) Maturitas Penilaian SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada Tahun 2022 adalah Nilai SPIP berdasarkan Penilaian Cepat (Baseline) ditargetkan sebesar 3,0 dan terealisasi dengan nilai 3,002 (Level 3 Terdefenisi).

Pada Tahun 2023 adalah Nilai SPIP berdasarkan Penilaian Cepat (Baseline) ditargetkan sebesar 3,2 dan terealisasi dengan nilai 3,002 (Level 3 Terdefenisi), namun belum dilakukan Penilaian Mandiri oleh Perangkat Daerah Sampel sehingga Nilai SPIP sebesar 1 (satu)

Untuk Tahun 2024, Nilai SPIP berdasarkan Penilaian Mandiri (PM) ditargetkan sebesar 3,3 dan perkiraan Tingkat Capaian Realisasi dengan nilai 3,2 (Level 3 Terdefenisi).

b. Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2022, realisasi anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada mencapai 93,71% dari total anggaran sebesar Rp. 10.064.083.400,- (Sepuluh Miliar Enam Puluh Empat Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.430.852.616,- (Sembilan Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Belas Rupiah).

Pada Tahun 2023, realisasi anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada mencapai 86,24% dari total anggaran sebesar Rp. 12.581.450.000,- (Dua Belas Miliyar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.850.510.248,- (Sepuluh Miliyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).

Uraian di atas menggambarkan keberhasilan namun di sisi lain juga menunjukkan belum maksimalnya dalam pencapaian target yang disebabkan oleh beberapa permasalahan, diantaranya:

a. Belum dipenuhinya usul kebutuhan jumlah SDM dan kompetensinya untuk melaksanakan kegiatan pengawasan sehingga penugasan pengawasan belum seluruhnya berbasis kompetensi;
b. Kurangnya pemahaman tentang SPIP;
c. Belum dilakukan Penilaian Mandiri (PM) oleh Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai sampel (berdasarkan Anggaran dan Program Prioritas)
d. Kurangnya komitmen OPD dalam mengedepankan akuntabilitas dari sisi kinerja sehingga akuntabilitas kinerja belum mendapat perhatian yang besar.

e. Belum adanya penetapan sanksi yang tegas bagi OPD yang tidak menerapkan akuntabilitas kinerja;
f. Adanya keterbatasan kapabilitas SDM di bidang akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah serta;
g. Masih belum terintegrasinya Sistem AKIP dengan sistem perencanaan dan sistem penganggaran.
h. Belum maksimalnya perangkat daerah menindaklanjuti hasil pengawasan APIP dan hasil pemeriksaan BPK-RI.
i. Terjadi pemuktahiran dari Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 ke Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sehingga mengubah indicator kinerja outcome pada Tahun 2022 dan perubahan indikator pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
j. Belum tersusunnya Risk Register Perangkat Daerah.

Untuk meningkatkan capaian kinerja dimasa mendatang maka perlu menetapkan beberapa kebijakan strategis, antara lain dengan :

a. Peningkatan anggaran secara bertahap setiap tahun anggaran;
b. Merumuskan Ratio kebutuhan SDM APIP melalui Analisis Beban Kerja (ABK) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sesuai dengan kompetensi dalam bidang pengawasan
c. Penambahan kuantitas aparatur pengawasan melalui pelaksanaan diklat teknis dan fungsional bagi aparatur tata laksana pengawasan dan pegawai baru;
d. Menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi tindak lanjut rekomendasi BPKP terkait peningkatan level kapabilitas APIP dan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pemerintah Daerah;
e. Mendorong setiap pejabat fungsional untuk menjadi anggota profesi dan mengikuti kegiatan organisasi profesi;

f. Mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan untuk mengelola Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan yang dilakukan;
g. Meningkatkan pengawasan terhadap pengimplementasian SPIP dan Penerapan SAKIP.
h. Melaksananakan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) dengan sebaik-baiknya dan mengoptimalkan anggaran yang tersedia seefektif dan seefisien mungkin dalam rangka peningkatan kinerja tenaga pengawasan dan pelaksana di lingkungan Inspektorat Daerah.
i. Melakukan Penilaian Mandiri (PM) SPIP dan Kepabilitas APIP setiap tahunnya untuk mencapai target yang ditentukan.

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tersaji dalam Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1 (Tabel T-C.29.)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Kepulauan Selayar

Nama Perangkat Daerah: Inspektorat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*) dam Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**									
6	**01**				**INSPEKTORAT**									
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Capaian Kinerja (%)**	**70,53%**	**57,65%**	**63,03%**	**63,03%**	**100,00%**	**70,28%**	**190,96%**	**270,75%**
						Persentase Capaian Keuangan (%)	**88,00%**	**75,91%**	**83,00%**	**81,69%**	**98,42%**	**85,00%**	**242,60%**	**275,68%**
6	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**91,46%**	**91,46%**	**100,00%**	**291,46%**	**291,46%**
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3	3	100,00%	3	9	300%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*) dam Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Peyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1	100,00%	1	3	300%
6	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Peyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1	100,00%	1	3	300%
6	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen				1	1	100%
6	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen				1	1	100%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*) dam Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	1 Laporan	12	12	100,00%	12	25	208%
6	01	01	2.02	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	1 Laporan	3	3	100,00%	3	7	233%
6	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat Daerah**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**		**200,00%**	**200,00%**
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/ bulan	50 Orang/ bulan	50	50	100,00%	50	150	300%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*) dam Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6	01	01	2.02	05	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1	1	100,00%	1	3	300%
6	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat Daerah**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**97,00%**	**97,00%**		**197,00%**	**197,00%**
6	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	0 Paket				0	0	0%
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	21 Orang	30	30	100,00%	30	81	270%
6	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknik Implemetasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	0 Orang	40	40	100,00%	40	80	267%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*) dam Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**95,00%**	**95,00%**		**195,00%**	**195,00%**
6	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	1 Unit	1	1	100,00%	1	3	150%
6	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	7 Unit	10	10	100,00%	10	27	270%
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	0 Unit	45	45	100,00%	45	90	500%
6	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**90,00%**	**90,00%**		**190,00%**	**190,00%**
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	1 Laporan	1	1	100,00%	3	5	167%
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1	1	100,00%	1	3	300%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*) dam Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPBMD**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**98,00%**	**98,00%**		**198,00%**	**198,00%**
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	18 Unit	18	18	100,00%	18	54	360%
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	35 Unit	35	35	100,00%	35	105	525%
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	3	3	100,00%	3	11	220%
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Prioritas)**	**3 Level**	**2 Level**	**3**	**2**	**66,67%**	**3**	**7**	**233%**
6	**01**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Persentase Pengawasan Internal yang Terlaksana**	**100%**	**100,00%**	**100,00%**	**89,53%**	**89,53%**		**189,53%**	**189,53%**
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	111 Laporan	9 Laporan	46	46	100,00%	46	101	91%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*) dam Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	258 Laporan	133 Laporan	100	100	100,00%	100	333	129%
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	28 Laporan	27 Laporan	32	32	100,00%	32	91	325%
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	2 Laporan	1	1	100,00%	1	4	400%
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	218 Laporan	68 Laporan	113	113	100,00%	113	294	135%
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	25 Dokumen	7 Dokumen	1	1	100,00%	25	33	132%
6	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Persentase Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Terselenggara**	**100%**	**100,00%**	**100,00%**	**45,69%**	**45,69%**		**145,69%**	**145,69%**
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	5 Laporan	Laporan						
6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	9 Laporan	95 Laporan	40	40	100,00%	1	136	1511%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*) dam Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**	**3,2 Nilai**	**2,8 Nilai**	**3**	**3,007**	**100,23%**	**3**	**8,807**	**275%**
6	**01**	**03**	**2**		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Persentase Kebijakan Teknis yang Ditetapkan**	**100%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100%**	**300,00%**	**300,00%**
6	01	03	2,01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	5 Rekomendasi	4 Rekomendasi	3	3	100,00%	1	8	160%
6	01	03	2,01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	Rekomendasi						
6	**01**	**03**	**2**		**Pendampingan dan Asistensi**	**Persentase Pelayanan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**95%**	**100,00%**	**82,85%**	**82,85%**		**177,85%**	**177,85%**
6	01	03	2,02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	45 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	4	3	75,00%	45	52	116%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*) dam Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6	01	03	2,02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	45 Perangkat Daerah	45 Perangkat Daerah	45	45	100,00%	45	135	300%
6	01	03	2,02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 Kegiatan	3 Kegiatan	5	4	80,00%	5	12	240%
6	01	03	2,02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	45 Perangkat Daerah	2 Kegiatan	3	2	66,67%	45	49	109%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai salah satu Perangkat Daerah yang ada dan eksistensi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 96, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129)

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai institusi (Perangkat Daerah) yang mengemban tugas di bidang pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah, memiliki peran dan tanggung jawab stategis dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tugas pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah yaitu membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas itu, maka fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ditetapkan sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

b. Penyelenggaraan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. Penyelenggaraan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. Penyelenggaraan administrasi Inspektorat Daerah;
f. Penyelenggaraan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait Tugas dan fungsinya.

Oleh karena kedudukan, tugas dan fungsinya tersebut maka Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dituntut untuk memberikan nilai tambah (*value added*) berupa peningkatan tata kelola Perangkat Daerah (*quality assurance*), memberikan pelayanan konsultasi (*consulting partner*) dan memberikan peringatan dini (*early warning system*) atas berbagai mal administrasi yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pemerintahan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menentukan tolok ukur dan indikator kinerja perlu dilakukan analisis pencapaian kinerja. Analisis pencapaian kinerja pelayanan tersebut disajikan dalam tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2. (Tabel T-C.30.)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(8)	(10)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)			Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2	Level 2 (2,81)	Level 3	Level 3	
2.	Nilai/Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)			3,1 Level 3	3,2 Level 3	3,2 Level 3	3,5 Level 3	3,002 Level 3	3,002 Level 3	3,5 Level 3	3,5 Level 3	
3.	Jumlah obyek pengawasan berkala yang diperiksa		√	634 LHP	669 LHP	700 LHP	725 LHP	612 LHP	539 LHP	725 LHP	750 LHP	
4.	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat (pembentukan/ penjenjangan dan teknis/substansi)		√	50 Orang	55 Orang	60 Orang	65 Orang	37 Orang	30 Orang	65 Orang	70 Orang	
5.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP yang ditindaklanjuti		√	65%	70%	75%	80%	57,77%	66,83%	80%	85%	
6.	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI yang ditindaklanjuti		√	68%	70%	72%	75%	74,23%	73,89%	75%	78%	
7.	Persentase Permintaan Pemeriksaan/Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti		√	100%	100%	100%	100%	67%	100%	100%	100%	
8.	Persentase OPD yang mendapat penilaian Hasil Evaluasi SAKIP dengan Kategori "Baik"		√	20%	30%	40%	80%	29,63%	48,15%	50%	60%	
9.	Jumlah regulasi/ kebijakan terkait pengawasan yang ditetapkan		√	10 Dokuemen	12 Dokumen	14 Dokumen	16 Dokumen	10 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	18 Dokumen	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(8)	(10)	(10)	(11)	(12)	(13)
10.	Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP		√	10 Perangkat Daerah	15 Perangkat Daerah	20 Perangkat Daerah	25 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	25 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	Belum dilakukan Penilaian Mandiri (PM) SPIP oleh seluruh Perangkat Daerah
11.	Persentase OPD yang Ditetapkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani		√	7%	9%	11%	13%	0%	0%	13%	15%	Belum dilakukan Penetapan OPD sebagai ZI menuju WBK WBBM
12.	Persentase pejabat yang telah menyampaikan LHKPN		√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
13.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			B	B	B	BB	B 69,99	BB 74,51	BB	A	
14.	Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan			Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	
15.	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perangkat Daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sampai dengan Tahun 2023 tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Sasaran ke-1: Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan 6 (enam) indikator kinerja yaitu:
   1) Indikator 1: Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)-Target Level 3

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Level Kapabilitas APIP	**Level**	**3**	**Level 2 Nilai 2,81**	**Belum Tercapai**

Penilaian mandiri (*Self Assesment*) yang pertama atas level kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dilakukan pada Tahun 2016 setelah sosialisasi dari Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dengan hasil berada pada Level 1.

Pada Tahun 2017, dilaksanakan beberapa program dan kegiatan untuk meningkatkan Level Kapabilitas APIP Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut. Berdasarkan hasil penilaian kapabilitas APIP yang dilakukan Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan tanggal 11-14 Oktober 2017 dengan hasil penilaian kapabilitas berada pada Level 2.

Pada Tahun 2018, berdasarkan hasil penjaminan kualitas atas penilaian mandiri Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 Nomor: LQAPIP-821/PW21/6/2018 tanggal 21 Desember 2018 masih berada di Level 2.

Pada Tahun 2019, berdasarkan surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: S-031/PW21/6/2020

tanggal 10 Januari 2020 perihal: Atensi atas Peningkatan Kapabilitas APIP Level 3 Hasil Validasi Penjaminan Kualitas, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada Level 2 Plus/ Level 3 Dengan Catatan.

Pada Tahun 2022, berdasarkan surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: PE.09.03/LHE-1008/PW21/6/2022 tanggal 28 November 2022 perihal: Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada Level 2 (dua) dengan skor 2,11.

Pada Tahun 2023, BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan melakukan evaluasi atas penilaian mandiri kapabilitas Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, dengan uraian hasil sebagaimana disajikan pada Laporan Hasil Evaluasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor PE.09.03/LHE1014/PW21/6/2023, Tanggal 29 Desember 2023.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tingkat kapabilitas Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada **level 2** dengan **skor 2,81** (skala 1–5) dan karakteristik *structured*, dengan simpulan pemenuhan per elemen kapabilitas APIP sebagai berikut:

No	Elemen	Evaluasi 2023	
		Level	**Skor**
Komponen Dukungan Pengawasan (*Enabler*)			
1.	Pengelolaan SDM	3	0,54
2.	Praktik Profesional	2	0,45
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,18
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,18
5.	Struktu Tata Kelola	3	0,36
Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result)			
6.	Peran dan Layanan	2	1,10
Simpulan		**2**	**2,81**

Masih banyak area yang memerlukan perbaikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, antara lain:

1. Masih adanya gap atau kekurangan jumlah SDM dibandingkan dengan formasi kebutuhan ideal, tidak diikuti upaya pengembangan SDM yang memadai dan pemanfaatan *Continuous Auditing Continuous Monitoring* (CACM) untuk efisiensi dan efektivitas pengawasan;
2. Implementasi manajemen risiko belum memadai, yaitu baru menghasilkan peta risiko operasional, belum mencakup risiko program strategis Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Selain itu, terdapat kebijakan yang belum diperbarui yaitu Internal Audit Charter, belum memuat mandat untuk melakukan asurans atas efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian (GRC). Kondisi tersebut mempengaruhi Inspektorat pada penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis

Risiko (PPBR) dan pelaksanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko (PIBR);

3. Masih lemahnya penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), yaitu belum mempertimbangkan seluruh area pengawasan yang dapat dijadikan sasaran pengawasan/audit universe, belum mengidentifikasi dan membuat prioritas area pengawasan berdasarkan tingkat kematangan MR dan risiko tertinggi, dan belum mempertimbangkan masukan dari stakeholders;
4. Kualitas pelaporan hasil Penjaminan dan Peningkatan Kualitas belum optimal, yaitu kurang informatifnya substansi materi laporan dan belum didukung survei kepuasan/kepercayaan stakeholders atas kualitas pengawasan;
5. Belum optimalnya koordinasi dan sinergi dengan pihak lain (BPK, KPK, Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga, Inspektorat Daerah lainnya, dan BPKP) terkait area dan hasil pengawasan;
6. Belum optimalnya kualitas pelaksanaan assurance/pengawasan, yaitu penyusunan program kerja pengawasan belum sepenuhnya *risk based* dan dukungan kertas kerja pengawasan belum memadai, serta perencanaan dan hasil pengawasan belum dikomunikasikan kepada auditee, sehingga berdampak pada kualitas rekomendasi belum bersifat strategis mengatasi akar penyebab masalah tata kelola pemerintah daerah;
7. Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan (ILHP) belum sepenuhnya memperhatikan ketepatan substansi, ketepatan waktu pelaporan, dan ketepatan pendistribusian kepada stakeholders;
8. Belum memadainya sistem monitoring tindak lanjut hasil assurance dan consulting.

Kelemahan tersebut berpengaruh pada belum optimalnya perencanaan pengawasan berbasis risiko dan hasil pengawasan yang belum berkontribusi optimal dalam perbaikan kualitas tata kelola, pengelolaan risiko, dan pengendalian intern atas program strategis Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, serta mendeteksi dan mencegah terjadinya penyimpangan/fraud.

Untuk itu, Bupati Kepulauan Selayar dapat melakukan upaya-upaya strategis sebagai berikut:

1. Memberikan atensi terkait upaya pemenuhan kuantitas dan kualitas SDM Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan kebutuhan;
2. Menyusun peta risiko strategis Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, baik secara organisasional maupun lintas sektoral, agar dapat menjadi acuan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menetapkan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
3. Mendorong peningkatan koordinasi dan sinergi antara Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar dengan BPK, KPK, Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga, Inspektorat Daerah lainnya, dan BPKP, antara lain terkait perencanaan, pelaksanaan, pengkomunikasian hasil pengawasan, dan tindak lanjutnya;
4. Menginstruksikan Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar untuk:
    a. Melakukan pengawasan terhadap efektivitas Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang telah dibangun atas program strategis daerah dan strategis OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar;

b. Menindaklanjuti rekomendasi peningkatan kapabilitas APIP sebagaimana disajikan pada Laporan Hasil Evaluasi dan melakukan pemantauan atas tindak lanjut tersebut;
c. Membuat SOP dan sistem informasi pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

2) Indikator 2: Nilai/Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)-Target Level 3

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Score Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	**Level**	**3**	**Level 3**	**Tercapai**
	Nilai	**3.0**	**3.002**	**Tercapai**

Berdasarkan Surat dari Badan Pengawasan Kuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 29 November 2022, nomor: PE.05.02/LEV-1038/PW21/3/2022, perihal Hasil Penilaian Cepat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (Terdefenisi) dengan nilai 3,002 dan skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 2,850 serta skor IEPK sebesar 2,766.

Dari hasil penilaian tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

a) Penetapan Tujuan
   (1) Terdapat program yang belum ditetapkan sasaran programnya.
   (2) Terdapat sasaran yang belum berorientasi hasil.
   (3) Terdapat indikator kinerja yang belum SMART.
   (4) Terdapat penetapan target yang tidak memperhatikan capaian tahun lalu
b) Struktur dan Proses
   (1) Terdapat beberapa pengendalian yang belum diimplementasikan sesuai dengan kebijakan.
   (2) Pemerintah Daerah belum memiliki kebijakan manajemen risiko.
   (3) Belum ada program terkait dengan program pendidikan antikorupsi.
   (4) Belum terdapat kebijakan dan implementasi yang mengatur tentang risiko kemitraan dan risiko *fraud.*

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu dilakukan perbaikan dengan:

a) Melakukan reviu/evaluasi perencanaan untuk memperbaiki sasaran, indikator dan target kinerja program dan kegiatan dalam perencanaan Tahun 2023.
b) Melakukan reviu dan menyusun *action plan* terkait penetapan target.
c) Mendorong percepatan penetapan kebijakan MR yang memadai.
d) Mempertimbangkan penyusunan program dan kegiatan terkait dengan pendidikan antikorupsi.
e) Mendorong pelaksanaan manajemen risiko baik risiko tingkat pemda, risiko kemitraan maupun risiko *fraud.*

3) Indikator 3: Jumlah obyek pengawasan berkala yang diawasi-Target 669 LHP

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah Obyek Pengawasan	**Laporan**	**669**	**539**	**Belum Tercapai**

Obyek pengawasan yang dilakukan oleh APIP diatur dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang disusun setiap tahun dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati. PKPT merupakan rencana kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah dari Bulan januari samapi dengan Bulan Desember tahun berjalan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah telah dilakukan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan laporan rekapan hasil pengawasan Inspektorat Daerah pada Tahun 2023, jumlah laporan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) terhadap objek pengawasan yang dilakukan oleh APIP terealisasi sebanyak 539 LHP dari target 669 LHP.

Dari hasil pencapaian tersebut, terdapat beberapa kendala dan hambatan dalam pencapaiannya yaitu:

a) Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang direncanakan untuk pengawasan (audit) terhadap Perhitungan Kerugian Negara, Pengaduan Masyarakat dan Pengawasan lainnya yang bersifat mandatory tetap direncanakan penganggaran dan penyusunan laporannya. Namun dalam pelaksanaanya selama 1 (satu) tahun anggaran jumlah yang direncanakan pengawasan dan laporannya belum sesuai dengan target.
b) Kegiatan pendampingan urusan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh APIP dalam menjalankan

peran *Consulting* yaitu Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan tidak dilaksanakan. Hal ini disebabkan kapasitas dan kompetensi APIP. Tidak semua APIP memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai untuk memberikan pendampingan penyusunan laporan keuangan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu dilakukan perbaikan dengan:

a) Melakukan analisis risiko dengan mengidentifikasi area-area yang rentan terhadap ketidakpatuhan, penyalahgunaan kekuasaan, dan potensi kelemahan dalam sistem pengendalian internal. Dengan analisis risiko yang tepat, pimpinan APIP dapat menentukan prioritas dan menitikberatkan pengawasan pada area yang paling penting dan berisiko tinggi;
b) Melakukan monitoring secara berkala untuk memastikan bahwa pengawasan berjalan sesuai rencana dan mengevaluasi hasilnya terhadap pencapaian tujuan pengawasan. Evaluasi ini dapat membantu dalam mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan untuk pengawasan selanjutnya;
c) Menyediakan pelatihan dan pendidikan secara berkala tentang standar akuntansi dan pelaporan keuangan yang berlaku. APIP harus memahami prinsip-prinsip akuntansi yang relevan dan memiliki pengetahuan tentang struktur laporan keuangan, seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas;
d) Membuat panduan dan prosedur yang jelas dan terstruktur mengenai proses penyusunan laporan keuangan. Panduan ini harus mencakup langkah-langkah yang harus diikuti, format yang sesuai, dan penjelasan tentang aspek-aspek kritis dalam penyusunan laporan keuangan.

4) Indikator 4: Jumlah aparatur yang mengikuti diklat (pembentukan/ penjenjangan dan teknis/substansi)- Target 55 Orang

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat	**Orang**	**55**	**30**	**Belum Tercapai**

Pengembangan kompetensi APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitas dalam melaksanakan tugas pengawasan intern. Hal ini membantu APIP untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan tugas-tugas pengawasan. Dengan pengetahuan yang lebih mendalam tentang pengawasan, APIP dapat mengidentifikasi risiko-risiko yang lebih baik, menganalisis data dengan lebih akurat, dan memberikan rekomendasi yang lebih relevan dan berharga.

Berdasarkan laporan realisasi diklat Tahun 2023, jumlah pegawai yang mengikuti diklat (pembentukan/ penjenjangan dan teknis/substansi) sebanyak 30 orang dari target sebanyak 55 orang. Belum tercapainya target yang ditentukan disebabkan karena diklat belum dirancang berdasarkan analisis kebutuhan yang mendalam dan sesuai pemenuhan jam pelatihan minimal selama setahun. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk melakukan evaluasi menyeluruh tentang program diklat yang ada, memastikan diklat didasarkan pada analisis kebutuhan (Analisis GAP) yang tepat, menyediakan dukungan yang memadai, dan memonitor implementasi dan dampak dari pelatihan yang telah diberikan.

5) Indikator 5: Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP yang ditindaklanjuti - Target 70%

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP yang ditindaklanjuti	**Persentase**	**70**	**66,83**	**Belum Tercapai**

Setelah APIP melakukan pengawasan dan menemukan temuan-temuan yang perlu perbaikan, langkah selanjutnya adalah menindaklanjuti hasil pengawasan. Tindak lanjut harus dilakukan untuk memastikan bahwa masalah-masalah yang diidentifikasi segera diperbaiki dan situasi yang sama tidak terulang di masa mendatang.

Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai APIP melaksanakan pengawasan yang menghasilkan temuan administrasi maupun temuan keuangan yang disusun dalam Laporan Hasil Pengawasan berdasarkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk menilai kinerja perangkat daerah dan desa. Hasil pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulaun Selayar secara keseluruhan bertujuan untuk memberikan manfaat bagi kinerja perangkat daerah dan desa. Hasil pemeriksaan tersebut berupa temuan hasil pemeriksaan dan rekomendasinya yang dapat mengukur sejauh mana kinerja perangkat daerah dan desa sehingga dapat mengetahui kelemahan dari sisi manajemen, sisi keuangan dan sisi lainnya sehingga dapat disempurnakan dan diperbaiki dengan menindak lanjuti temuan hasil pemeriksaan sesuai rekomendasi APIP.

Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP kepada Perangkat Daerah dan Desa tersebut dapat dilaksanakan dengan baik apabila media komunikasi disajikan secara jelas, lengkap, akurat, dan mudah dipahami.

Berdasarkan inventarisasi data tindak lanjut atas seluruh kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh APIP sampai dengan Desember Tahun 2023 terealisasi sebesar 66,83% dari target 75%. Belum tercapainya target yang ditentukan disebabkan ketidakpahaman perangkat daerah dan desa tentang pentingnya tindak lanjut. Beberapa Perangkat Daerah dan Desa mungkin tidak sepenuhnya memahami pentingnya tindak lanjut terhadap rekomendasi dari APIP. Perangkat Daerah dan Desa merasa bahwa rekomendasi tersebut hanya bersifat saran atau panduan, tanpa menyadari bahwa tindak lanjut diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja organisasi.

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan pencapaian tindaklanjut ini adalah dengan membentuk Tim Pendampingan Penyelesaian Tindak Lanjut Perangkat Daerah dan Desa. Tim ini bertugas untuk mendampingi perangkat daerah dan desa dalam menyelesaikan rekomendasi sampai dengan mendapatkan status tindak lanjut “Selesai”. Kegiatan yang dilakukan oleh Tim adalah menjadi konsultan pada saat perangkat daerah dan desa memerlukan dan menyampaikan status penyelesaian tindak lanjut.

6) Indikator 6: Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI yang ditindaklanjuti – Target 70%.

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI yang ditindaklanjuti	**Persentase**	**70**	**73,89**	**Tercapai**

Sama halnya dengan pengawasan yang dilakukan oleh APIP, pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap pemerintah daerah merupakan salah satu tugas penting BPK-RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan keuangan negara. BPK-RI memiliki peran untuk melakukan audit atas laporan keuangan pemerintah daerah guna menilai keabsahan, kewajaran, dan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Setelah pemeriksaan dilakukan, BPK-RI akan menyusun laporan hasil pemeriksaan yang berisi temuan dan rekomendasi. Rekomendasi ini mencakup perbaikan dan tindakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan dan aset.

Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK sampai dengan Desember Tahun 2023 terealisasi sebesar 73,89% dari target 70%. Keberhasilan mencapai target tersebut tidak lepas dari faktor sebagai berikut:

a) Tingkat komitmen dari pemerintah daerah sangat penting untuk berhasil melaksanakan tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK-RI. Jika pemerintah

daerah sungguh-sungguh berkomitmen untuk memperbaiki dan memperkuat sistem pengelolaan keuangan dan aset, peluang mencapai target yang ditentukan akan lebih tinggi.

b) Kepemimpinan yang kuat dan berdedikasi dalam pemerintah daerah dapat memberikan arahan dan dukungan yang diperlukan untuk menerapkan tindakan perbaikan yang tepat.
c) Rencana tindak lanjut yang terperinci dan jelas akan membantu pemerintah daerah untuk menetapkan prioritas, menentukan langkah-langkah yang harus diambil, dan mengatur waktu pelaksanaan.
d) Sumber Daya yang Memadai. Tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK-RI memerlukan alokasi sumber daya yang memadai, seperti anggaran, personel, dan teknologi yang diperlukan untuk melaksanakan perubahan dan perbaikan.
e) Partisipasi dan Keterlibatan Seluruh Pihak. Melibatkan seluruh pihak yang terkait dalam proses tindak lanjut dapat meningkatkan peluang keberhasilan. Ini mencakup keterlibatan pegawai, manajemen, dan pihak eksternal yang relevan.
f) Monitoring dan Evaluasi yang Berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi tindak lanjut. Dengan memantau kemajuan dan mengevaluasi hasil, mereka dapat mengidentifikasi permasalahan yang mungkin muncul dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan.
g) Kapabilitas dan Kapasitas. Keberhasilan tindak lanjut juga bergantung pada kapabilitas dan kapasitas pegawai pemerintah daerah. Jika pegawai memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sesuai, implementasi tindak lanjut akan lebih lancar.

7) Indikator 7: Persentase Permintaan Pemeriksaan/ Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti-Target 100%

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	**Persentase**	**100**	**100**	**Tercapai**

Pengaduan masyarakat yang diterima oleh Inspektorat Daerah merupakan salah satu cara bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, masalah, atau permasalahan terkait dengan pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan kebijakan-kebijakan di tingkat daerah. Inspektorat Daerah adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah, termasuk melakukan pengawasan, audit, dan penanganan pengaduan terhadap pelayanan publik dan potensi pelanggaran atau penyimpangan di instansi pemerintah.

Sejak tahun 2017, pengaduan masyarakat yang diterima oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar seluruhnya ditindaklanjuti, dengan demikian realisasinya 100% selama 6 (enam) tahun terakhir. Berdasarkan Rekapitulasi Pengaduan yang ditindaklanjuti Tahun 2023, terdapat 5 (lima) pengaduan yang masuk dan semuanya ditindaklanjuti sehingga capaian realisasinya sebesar 100%.

Adapun keberhasilan dalam mencapai target tersebut adalah:

a) Adanya Standar Operasional Prosedur tentang penanganan pengaduan masyarakat, sehingga pengaduan didukung dengan materi/bukti yang jelas dalam pelaksanaan penanganan pengaduan;

b) Adanya perhatian pimpinan dalam menganggarkan kegiatan penanganan pengaduan masyarakat.

Untuk meningkatkan capaian tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar memberikan layanan pengaduan berbasis website. Tahun 2020 Inspektorat Daerah telah memiliki Sistem Informasi Layanan Pengaduan Masyarakat Selayar (SILADUS). Sistem Informasi Layanan Pengaduan Masyarakat Selayar ini merupakan sarana yang disediakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui Inspektorat Daerah untuk berpartisipasi membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, efektif dan efisien serta pelayanan publik yang berkualitas.

8) Indikator 8: Persentase PD yang mendapat penilaian Hasil Evaluasi SAKIP dengan Kategori "Baik" – Target 30%

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase PD yang mendapat penilaian Hasil Evaluasi SAKIP dengan Kategori "Baik"	**Persentase**	**30**	**48,15**	**Tercapai**

SAKIP merupakan sistem untuk mengukur dan memantau kinerja instansi pemerintah, termasuk Perangkat Daerah (PD) berdasarkan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi SAKIP dilakukan secara periodik dan hasilnya memberikan penilaian tentang tingkat kinerja dan pencapaian tujuan dari masing-masing PD.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja PD dilaksanakan untuk memperoleh umpan balik yang objektif untuk perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Oleh sebab itu dengan semakin meningkatnya nilai evaluasi SAKIP, diharapkan dapat mendorong PD untuk

mewujudkan pencapaian akuntabilitas kinerja hasil organisasi secara konsisten sesuai dengan yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah, terdapat 13 (tiga belas) perangkat daerah dari total 27 (duapuluh tujuh) perangkat daerah yang yang mendapat penilaian Hasil Evaluasi SAKIP dengan Kategori "Baik" atau berada pada interval/range nilai 60,01-70,00. Jika dipersentasekan realisasinya sebesar 48,15% dari target 30%. Terdapat beberapa faktor pendukung sehingga target yang ditentukan sudah tercapai antara lain:

a) Perangkat daerah telah menindaklanjuti rekomendasi tim monitoring dan evaluasi SAKIP pada tahun sebelumnya.
b) Dokumen yang merupakan substansi mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja maupun pencapaian sasaran kinerja telah disusun dengan baik.
c) Adanya komitmen PD dalam mengedepankan akuntabilitas dari sisi kinerja sehingga akuntabilitas kinerja belum mendapat perhatian yang besar.

Untuk meningkatkan capaian kinerja tahun berikutnya, upaya yang akan dilakukan adalah adanya melaksanakan koordinasi yang intensif Bagian Organisasi Setda dan Bappelitbangda yang berperan sebagai *leading sector* dalam melakukan pembinaan dokumen SAKIP bagi seluruh PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mensosialisasikan sekaligus memberikan bimbingan teknis terhadap penerapan Sistem AKIP kepada seluruh PD dan dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan untuk lebih meningkatkan kualitas dan

memperkuat implementasi Sistem AKIP.

b. Sasaran ke-2: Meningkatnya SKPD yang Bebas dari Korupsi, dengan 4 (empat) indikator kinerja yaitu:
   1) Indikator 9: Jumlah regulasi/ kebijakan terkait pengawasan yang ditetapkan – Target 10 Dokumen

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah regulasi/ kebijakan terkait pengawasan yang ditetapkan	**Dokumen**	**12**	**16**	**Tercapai**

Kebijakan terkait pengawasan yang ditetapkan dapat berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Surat Keputusan Bupati, Surat Edaran Bupati, serta Surat Keputusan Inspektur Daerah yang keseluruhan mengatur tentang pengawasan intern terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dari hasil rekapitulasi kebijakan yang diterbitkan/ditetapkan berdasarkan usulan Inspektorat Daerah pada Tahun 2023, terdapat 16 (enam belas) dokumen kebijakan yang telah ditetapkan sehingga mencapai target yang direncanakan yang merupakan elemen kunci yang membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari proses pengawasan. Keberhasilan terhadap pencapaian ini didukung oleh beberapa faktor pendukung yaitu:

a) Komitmen Tinggi dari Pimpinan. Pimpinan lembaga pengawas atau pemerintah harus memiliki komitmen yang kuat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum. Komitmen ini akan menciptakan lingkungan yang mendukung untuk melakukan pengawasan yang berdaya guna.
b) Independensi Lembaga Pengawas. Lembaga pengawas harus memiliki tingkat independensi yang

memadai dari tekanan politik atau kepentingan lainnya untuk dapat melakukan pengawasan secara obyektif dan adil.

c) Kapasitas dan Kompetensi. Pegawai lembaga pengawas harus memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam bidang yang relevan, termasuk pengetahuan tentang hukum, keuangan, dan aspek teknis lainnya yang diperlukan dalam pengawasan.

2) Indikator 10: Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP – Target 10 Perangkat Daerah

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP	**Perangkat Daerah**	**10**	**0**	**Belum Tercapai**

SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) adalah suatu sistem yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan pengawasan internal dalam instansi pemerintah. Pengendalian intern bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi, melindungi aset, dan memastikan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Pada Tahun 2023, Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai sampel berdasarkan Program Prioritas dan Pagu Anggaran pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, belum melakukan Penilaian Mandiri (PM) Penyelenggaran SPIP Terintegrasi.

Terdapat beberapa hambatan dalam melakukan PM tersebut, yaitu:

a) Kurangnya kesadaran dan pehamaman OPD akan pentingnya tujuan dari SIPI Terintegrasi.

b) Organisasi belum sepenuhnya siap dalam hal infrastruktur, sumber daya manusia, atau sistem informasi untuk mendukung pelaksanaan PM.

c) Proses penilaian mandiri sering kali membutuhkan perubahan dalam budaya organisasi dan keterlibatan dari semua pihak terkait.
d) Ketidakjelasan atau perubahan dalam peraturan atau regulasi yang mengatur SPIP.
e) Kesulitan dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk melakukan evaluasi SPIP secara komprehensif.
f) Proses PM SPIP terintegrasi mempunyai tingkat kompleksitas yang tinggi dan membutuhkan pemahaman yang mendalam serta koordinasi yang baik antar unit organisasi.

3) Indikator 11: Persentase OPD yang Ditetapkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani – Target 9%

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase OPD yang Ditetapkan sebagai WBK-WBBM	**Persentase**	**9%**	**0%**	**Tidak Tercapai**

WBK merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari korupsi, efisien, dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Perangkat Daerah atau unit kerja yang ditetapkan sebagai WBK berarti telah memenuhi sejumlah kriteria yang menunjukkan komitmen mereka untuk mencapai tata kelola yang baik.

Wilayah Bebas, Bersih dan Melayani adalah langkah lanjutan dari WBK yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas

pelayanan publik.

Terdapat 2 (dua) tahapan dalam pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM yaitu Tahapan Pencanangan dan Tahapan Proses Pembangunan. Pada Tahun 2022, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar belum menetapkan Perangkat Daerah yang dicanangkan sebagai pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Tahun 2023. Hal ini menyebabkan pencapaian atas target yang direncanakan sebesar 9% Perangkat Daerah atau minimal 3 (tiga) perangkat daerah belum tercapai.

Hambatan yang dihadapi dalam pencanangan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM disebabkan oleh berbagai faktor antara lain:

a) Kurangnya Sumber Daya: Pembangunan zona integritas membutuhkan sumber daya manusia, teknis, dan finansial yang memadai. Jika pemerintah daerah tidak memiliki anggaran yang cukup atau sumber daya yang memadai, implementasi program ini bisa menjadi sulit.
b) Kurangnya Kesadaran oleh para pejabat pemerintah daerah dan staf terkait pentingnya pembangunan zona integritas dan manfaatnya bagi pelayanan publik dan masyarakat. Kesadaran yang kurang tentang masalah integritas dan tata kelola pemerintahan yang baik dapat menghambat langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai WBK/WBBM.

Untuk memperbaiki capaian kinerja tahun berikutnya, upaya yang akan dilakukan adalah membangun komitmen yang kuat dari kepala daerah dan pejabat publik untuk melakukan perubahan yang diperlukan sebagai upaya untuk menciptakan pemerintahan daerah yang lebih transparan, akuntabel, efisien, dan bersih dari korupsi. Hal ini memerlukan

kerjasama dan keterlibatan aktif dari berbagai pihak.

4) Indikator 12: Persentase pejabat yang telah menyampaikan LHKPN – target 100%

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Pejabat yang telah menyampaikan LHKPN	**Persentase**	**100%**	**100%**	**Tercapai**

LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) adalah laporan yang wajib diisi oleh semua penyelenggara negara, termasuk pejabat pemerintahan, untuk melaporkan harta kekayaan mereka secara transparan dan berkala. Pada setiap tingkatan pemerintahan, terdapat berbagai pejabat yang harus menyampaikan LHKPN sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demi kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara serta evaluasi percepatan pemberantasan korupsi melalui pelaporan harta kekayaan penyelenggara Negara, maka perlu melakukan inventarisasi Pejabat yang wajib membuat LHKPN yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Berdasarkan laporan Monitoring Kepatuhan Penyelenggara Negara Tahun 2023 melalui e-lhkpn.kpk.go.id, terdapat 208 (duaratus delapan) pejabat yang ditetapkan sebagai wajib lapor. Dari 208 (duaratus delapan) wajib lapor tersebut telah melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara secara tepat waktu atau dengan realisasi sebesar 100%.

Pencapaian pelaporan LHKPN yang tepat waktu oleh para pejabat pemerintahan dapat dipengaruhi oleh

beberapa faktor pendukung yaitu:

a) Kesadaran akan pentingnya integritas dan transparansi dalam pemerintahan serta komitmen untuk mematuhi aturan pelaporan LHKPN adalah faktor kunci. Pejabat yang memiliki kesadaran dan komitmen tinggi akan lebih cenderung melaporkan harta kekayaan mereka secara tepat waktu dan jujur.
b) Keberadaan regulasi dan undang-undang yang jelas dan kuat tentang pelaporan LHKPN sangat penting. Regulasi ini harus mengatur persyaratan, batas waktu, dan sanksi atas pelanggaran yang memadai untuk mendorong pejabat agar mematuhi kewajibannya.
c) Sistem pengawasan yang efektif, independen dan transparan dapat meningkatkan akuntabilitas dan mendorong pelaporan yang lebih jujur.
d) Memiliki sistem pelaporan yang mudah diakses dan mudah digunakan oleh pejabat dapat membantu meningkatkan tingkat pelaporan
e) Pelatihan dan edukasi yang diberikan kepada pejabat mengenai pentingnya pelaporan LHKPN, prosesnya, dan konsekuensinya dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka tentang hal ini.

c. Sasaran ke-3: Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah, dengan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu:

1) Indikator 13: Nilai SAKIP Perangkat Daerah – Target Kategori B

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Nilai SAKIP	**Kategori**	**B**	**BB**	**Tercapai**

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD dilaksanakan

untuk memperoleh umpan balik yang objektif untuk perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Oleh sebab itu dengan semakin meningkatnya nilai evaluasi SAKIP, diharapkan dapat mendorong OPD untuk mewujudkan pencapaian akuntabilitas kinerja hasil organisasi secara konsisten sesuai dengan yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penilaian SAKIP Perangkat Daerah dibagi menjadi 7 kategori, yaitu:

Kategori	Nilai
D	0 - 30
C	30 - 50
CC	50 - 60
B	60 - 70
BB	70 - 80
A	80 - 90
AA	90 - 100

Realisasi indikator sasaran kinerja Inspektorat Daerah telah mencapai target yang ditetapkan, dimana target nilai SAKIP di Tahun 2023 minimal B. Nilai yang diperolah Inspektorat Daerah berdasarkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 tanggal 20 Februari 2023 yaitu 74,51 dengan kategori BB (Sangat Baik).

2) Indikator 14: Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan – Target Sesuai

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang tersaji sesuai SAP	**Kesesuaian**	**Sesuai**	**Sesuai**	**Tercapai**

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas

pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang undangan.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan: Akuntabilitas, Manajemen, Transparansi, Keseimbangan Antargenerasi, dan Evaluasi Kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi dari Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Laporan Keuangan Inspektorat Daerah telah disusun sesuai SAP berdasarkan, karakteristik kualitatif laporan keuangan, prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan.

3) Indikator 15: Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perangkat Daerah – Terget 100

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indeks Kepuasan Layanan	**Nilai**	**100**	**100**	**Tercapai**

Layanan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah adalah Surat Keterangan Bebas Temuan (SKBT). SKBT merupakan salah satu dokumen administrasi yang dipersyaratkan untuk dipergunakan setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam keperluan administrasi kepegawaian meliputi: Promosi Jabatan, Kenaikan

Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, penerbitan SK Pensiun, Penghargaan Satya Lencana Karya Satya, Tugas Belajar, Izin Belajar, Pengiriman Diklat Teknis/Fungsional, Penerbitan SK Jabatan Fungsional Tertentu, SK Pembebasan dan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional Tertentu, serta Penandatanganan Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Pindah Tugas dan Pensiun diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Bebas Temuan (SKBT) yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pada Tahun 2023, 1205 (seribu duaratus lima) berkas permohonan yang diajukan dan ditindaklanjuti secara keseluruhan setalah melewati tahapan-tahapan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP). Secara keseluruhan target 100% yang ditetapkan dengan realisasi secara keseluruhan maka Inspektorat Daerah dikategorikan tercapai.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, hasil evaluasi serta kajian terhadap pencapaian kinerja Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Inspektorat Daerah.

Isu Strategis yang berkaitan dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menjalankan Tugas Pokok

dan Fungsinya dihadapkan pada beberapa hal berikut:

a. Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar belum sepenuhnya melaksanakan sistem pengawasan intern berbasis manajemen risiko (*risk based management*) berdasarkan program dan pemilihan urusan Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah masih menggunakan faktor pertimbangan manajemen dalam penetapan risiko perangkat daerah;
b. Pengelolaan tugas pengawasan daerah belum didukung sistem informasi manajemen (SIM) berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dan memadai;
c. Masih kurangnya kesadaran OPD dalam menindaklanjuti temuan hasil pengawasan internal dan pemeriksaan eksternal;
d. Peningkatan Kapabilitas APIP;
e. Masih belum terbangunnya infrastruktur yang mendukung penerapan SPIP;
f. Belum tertibnya pengelolaan barang milik daerah pada masing-masing Perangkat Daerah;
g. Masih belum optimalnya Perangkat Daerah dalam menerapkan SAKIP; dan
h. Belum optimalnya kompetensi SDM pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selyar.

Dalam SDGs (*Suistanable Development Goals*) Inspektorat Daerah terlibat dalam Tujuan 16 SDGs yaitu Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tanggu dengan Indikator 16.5.1.(a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) dan 16.6.1.(b) Persentase Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota). Nilai IPAK Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 berdasarkan sumber data Badan Pusat Statistik dengan Nilai 3,92 mengalami penurunan capaian dari tahun sebelumnya (Tahun 2022) yang memperoleh nilai 3,93. Hal ini disebabkan program pendidikan dan kampanye anti korupsi yang tidak efektif atau tidak mencapai

semua lapisan masyarakat dapat mengurangi dampak upaya pencegahan korupsi dan budaya korupsi yang sudah lama ada dan diterima secara sosial di berbagai lapisan masyarakat. Untuk meningkatkan IPAK, perlu adanya upaya yang komprehensif dan berkelanjutan, termasuk penegakan hukum yang kuat, peningkatan sistem pengawasan, pendidikan dan kampanye anti korupsi yang efektif, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas di semua sektor.

Indikator SDGs lainnya yaitu Persentase Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pemerintah Daerah kabupaten Kepulauan Selayar mencapai Nilai 61,02 dengan Perdikat B (Baik). Hal ini meningkat dari pencapaian tahun sebelumnya (Tahun 2022) yaitu Nilai 60,49. Walaupun belum secara signifikan, namun Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan upaya -upaya dalam segi penguatan terhadap sistem perencanaan dan penganggaran serta peningkatan kualitas laporan kinerja.

The Institutes of Internal Auditors (IA), mengeluarkan pernyataan terkait peran termutakhir internal audit: “Internal audit adalah sebuah desain aktifitas yang independen, menjamin pencapaian tujuan dan pelayanan konsultasi untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan tata kelola organisasi. Internal audit membantu sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya dengan membawa sebuah pendekatan disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, kontrol dan proses tata kelola.” Peran mutakhir internal audit tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, secara rinci dijelaskan pada Pasal 11 yang mengatur bahwa perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal pemerintah (APIP) yang efektif sekurang-kurangnya mampu:

a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, serta efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;

b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Tiga peran mutakhir internal audit di atas merupakan tantangan yang harus dijawab oleh lnspektorat selaku APIP sekaligus juga merupakan peluang dalam mengembangkan pelayanan lnspektorat. Dalam rangka menentukan strategi untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, lnspektorat selain mengandalkan kemampuan sumber daya, juga memiliki sejumlah peluang yang bahkan dapat menjadi dasar untuk pengembangan pelayanan tugas pembinaan dan pengawasan lnpektorat sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu:

a. Adanya dukungan peraturan perundang-undangan yang kuat sebagai dasar kewenangan lnspektorat untuk melakukan setiap kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
b. Komitmen Bupati Kepulauan Selayar dalam mendukung peran lnspektorat dan dorongan supaya lnspektorat tidak "*doing business as usual*" atau bertahan dalam zona nyaman, lnspektorat harus bisa berinovasi untuk meningkatkan kemampuan dan perannya;
c. Adanya perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan aparat penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan) dalam menangani kasus-kasus pengaduan masyarakat dan kasus-kasus yang terindikasi tindak pidana korupsi.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan Rancangan Awal Renja 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar perlu dilakukan penyesuaian dengan hasil analisis kebutuhan. Terdapat perubahan besaran anggaran berdasarkan kebutuhan dan peningakatan pencapaian, walapun rumusan program dan

kegiatan/sub kegiatan yang telah disusun tidak mengalami perubahan. Proses perbandingan antara rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan tersebut dilakukan untuk mengetahui sesuai/ tidak sesuai, cocok/ ketidakcocokan besarannya (anggaran/volume/satuan) terhadap program dan kegiatan yang sudah dirumuskan.

Pada sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah terdapat peningkatan anggaran berdasarkan analisis kebutuhan menjadi Rp7.500.000. Hal tersebut disebabkan pada Tahun 2025, akan dilakukan penyusunan Rencana Strategis yang baru berdasarkan RPJMD baru dari Visi Misi Kepala Daerah (Bupati) terpilih pada Tahun 2024.

Pada sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi terdapat peningkatan anggaran berdasarkan analisis kebutuhan menjadi Rp1.500.000.000. Hal tersebut disebabkan Inspektorat Daerah wajib mengalokasikan anggaran Pelatihan Berkelanjutan bagi Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) minimal 120 jam per tahun atau minimal 3 mata diklat dengan JP 50 berdasarkan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri terkait Penguatan Inspektorat Daerah dan Permendagri tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pada sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terdapat peningkatan anggaran berdasarkan analisis kebutuhan menjadi Rp1.200.000.00. Hal tersebut dialokasikan untuk pengadaan mobil operasional pengawasan yang sesuai dengan kondisi geografis Kab. Kepulauan Selayar.

Pada sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya terdapat peningkatan anggaran berdasarkan analisis kebutuhan menjadi Rp350.000.000. Hal tersebut dialokasikan untuk Pengadaan Televisi (Smart TV) untuk rapat internal Irbanwil dan Tim Pengawas atau pihak lainnya.

Pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terdapat peningkatan anggaran berdasarkan analisis kebutuhan menjadi Rp287.000.000. Hal tersebut dialokasikan sesuai dengan jumlah kendaraan dinas yang ada saat ini.

Pada sub kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu terdapat peningkatan anggaran berdasarkan analisis kebutuhan menjadi Rp609.009.000. Hal tersebut dialokasikan untuk pengawasan bertaraf pengaduan dan kegiatan-kegiatan lainnya lingkup pemeriksaan khusus.

Pada sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan terdapat peningkatan anggaran berdasarkan analisis kebutuhan menjadi Rp95.000.000. Hal tersebut dialokasikan untuk penyusunan Rancangan Perkada/Perbup yang melibatkan unsur lain yaitu Biro Hukum Provinsi dan Kemenkumham Wilayah Provinsi.

Berikut ini akan diuraikan review terhadap rancangan awal renja dengan RKPD tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3. (Tabel T-C.31.)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten kepulauan Selayar

Nama Perangkat Daerah: Inspektorat Daerah

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**		**Persentase Capaian Kinerja (%)**	**Persentase**	**91%**	**7.792.034.559**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**		**Persentase Capaian Kinerja (%)**	**Persentase**	**91%**	**9.568.953.759**	
			Persentase Capaian Kinerja Keuangan (%)	**Persentase**	**71,51%**				**Persentase Capaian Kinerja Keuangan (%)**	**Persentase**	**71,51%**		
1.1	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Kepulauan Selayar**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun**	**Persentase**	**100%**	**30.200.000**	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Kepulauan Selayar**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun**	**Persentase**	**100%**	**31.500.000**	
1.1.1	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	6.200.000	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	7.500.000	Penyusunan Dokumen Renstra untuk RPJMD baru berdasarkan Visi Misi Kepala Daerah Terpilih pada Tahun 2024
1.1.2	*Koordinasi dan Peyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3.500.000	*Koordinasi dan Peyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1.1.3	*Koordinasi dan Peyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	3.500.000	*Koordinasi dan Peyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	3.500.000	
1.1.4	*Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD*	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	3.500.000	*Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD*	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	3.500.000	
1.1.5	*Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD*	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3.500.000	*Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD*	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3.500.000	
1.1.6	*Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	5.000.000	*Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	5.000.000	
1.1.7	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	5.000.000	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	5.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Kepulauan Selayar**	**Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat Daerah**	**Persentase**	**100%**	**4.984.787.259**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Kepulauan Selayar**	**Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat Daerah**	**Persentase**	**100%**	**4.984.787.259**	
1.2.1	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	49	4.980.787.259	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	50	4.980.787.259	
1.2.2	*Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	4.000.000	*Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	4.000.000	
1.3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Kepulauan Selayar**	**Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat Daerah**	**Persentase**	**100%**	**1.104.798.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Kepulauan Selayar**	**Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat Daerah**	**Persentase**	**100%**	**1.600.000.000**	
1.3.1	*Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	50	50.000.000	*Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	50.000.000	Pengadaan Baju/Rompi yang merupakan Identitas Tim dalam melakukan pengawasan

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1.3.2	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarakn Tugas dan Fungsi*	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	49	964.310.000	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarakn Tugas dan Fungsi*	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	49	1.500.000.000	Pemenuhan Diklat bagi JFA dan JF PPUPD minimal 120 jam per tahun
1.3.3	*Bimbingan Teknik Implemetasi Peraturan Perundang-Undangan*	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	49	90.488.000	*Bimbingan Teknik Implemetasi Peraturan Perundang-Undangan*	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	49	50.000.000	
1.4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Kepulauan Selayar**	**Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah**	**Persentase**	**100%**	**347.352.800**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Kepulauan Selayar**	**Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah**	**Persentase**	**100%**	**1.607.400.000**	
1.4.1	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3	113.991.000	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	1.200.000.000	Pengadaan Mobil Operasional berdasarkan Kondisi Kedaerahan sebagai Fasilitas Pengawasan
1.4.2	*Pengadaan Mebel*	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	20	57.400.000	*Pengadaan Mebel*	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10	57.400.000	
1.4.3	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	30	175.961.800	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	45	350.000.000	Pengadaan Televisi untuk Rapat Internal Irbanwil dan Tim Pengawas

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1.5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Kepulauan Selayar**	**Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase**	**100%**	**864.884.200**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Kepulauan Selayar**	**Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase**	**100%**	**864.884.200**	
1.5.1	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	145.297.000	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	145.297.000	
1.5.2	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	719.587.200	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	719.587.200	
1.6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Kepulauan Selayar**	**Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPBMD**	**Persentase**	**100%**	**460.012.300**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Kepulauan Selayar**	**Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPBMD**	**Persentase**	**100%**	**480.382.300**	
1.6.1	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20	266.630.000	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	18	287.000.000	
1.6.2	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	37.550.000	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	35	37.550.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1.6.3	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	155.832.300	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	155.832.300	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**		**Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)**	**Level**	**Level 3**	**4.084.144.341**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**		**Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)**	**Level**	**Level 3**	**4.715.786.000**	
2.1	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Persentase Obrik yang diawasi**	**Persentase**	**100%**	**3.304.448.941**	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Persentase Obrik yang diawasi**	**Persentase**	**100%**	**3.821.627.000**	
2.1.1	*Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah*	*Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	115	660.843.441	*Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah*	*Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	46	1.110.941.000	
2.1.2	*Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah*	*Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	265	852.947.000	*Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah*	*Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	100	1.442.163.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
2.1.3	*Reviu Laporan Kinerja*	*Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	28	187.569.000	*Reviu Laporan Kinerja*	*Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	32	167.569.000	
2.1.4	*Reviu Laporan Keuangan*	*Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	1	37.113.000	*Reviu Laporan Keuangan*	*Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	1	37.113.000	
2.1.5	*Pengawasan Desa*	*Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	220	1.255.976.500	*Pengawasan Desa*	*Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	81	728.725.000	
2.1.7	*Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP*	*Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	35	310.000.000	*Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP*	*Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	113	335.116.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
2.2	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Persentase Pengawasan Khusus yang terselenggara**	**Persentase**	**100%**	**779.695.400**	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Persentase Pengawasan Khusus yang terselenggara**	**Persentase**	**100%**	**894.159.000**	
2.2.1	*Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah*	*Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	8	285.150.000	*Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah*		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	5	285.150.000	
2.2.2	*Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu*	*Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	12	494.545.400	*Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu*	*Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	10	609.009.000	1. Pengawasan bertaraf pengaduan / permintaan; 2. Pemeriksaan Khusus lainnya
3	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**		**Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**	**Nilai/Score**	**3,3**	**824.912.100**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**		**Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**	**Nilai/Score**	**3,3**	**825.092.100**	
3.1	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Persentase kebijakan teknis yang ditetapkan**	**Persentase**	**100%**	**94.820.000**	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Persentase kebijakan teknis yang ditetapkan**	**Persentase**	**100%**	**95.000.000**	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
3.1.1	*Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan*	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	10	94.820.000	*Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan*	*Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	15	95.000.000	Alur/Proses Penyusunan Perkada/Perbup
3.2	**Pendampingan dan Asistensi**	**Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Persentase Pelayanan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase**	**100%**	**730.092.100**	**Pendampingan dan Asistensi**	**Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Persentase Pelayanan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase**	**100%**	**730.092.100**	
3.2.1	*Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah*	*Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	45	259.491.400	*Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah*	*Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	45	259.491.400	
3.2.2	*Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi*	*Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	45	37.428.000	*Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi*	*Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	45	37.428.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
3.2.3	*Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi*	*Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	5	293.740.700	*Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi*	*Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	5	293.740.700	
3.2.4	*Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas*	*Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	45	139.432.000	*Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas*	*Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	45	139.432.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Inspektorat Daerah mempunyai tugas pokok dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dalam kaitan tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentunya harus dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, ruang lingkup dan sasaran pengawasan dan pembinaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar meliputi:

a. Kegiatan Pengawasan, yaitu:
    1) Kinerja rutin pengawasan, meliputi reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu RKA SKPD, reviu LKPD, reviu Laporan Kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan serentak kas opname, evaluasi SPIP, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP;
    2) Pengawasan prioritas nasional meliputi monitoring dan evaluasi Dana BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsive gender, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, tindak lanjut perjanjian kerjasama

APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dan penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D);

3) Pengawalan reformasi birokrasi meliputi penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah dan evaluasi pelayanan publik;
4) Penegakan integritas meliputi penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasn korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan banturan kepentingan, survei penegakan integritas dan penanganan Whistle Blower System;

b. Kegiatan Non Pengawasan, yaitu pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis.
c. Reviu DAK Fisik
d. Survei Penilaian Integritas

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui:

a) Audit

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi

Instansi Pemerintah. Audit terdiri atas:

1) audit kinerja;
2) audit dengan tujuan tertentu.

b) Reviu

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

c) Evaluasi

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

d) Pemantauan

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan; dan;

e) Kegiatan pengawasan lainnya.

Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultansi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

Adapun sesuai dengan Stándar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang disusun oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), kegiatan Audit Intern di lingkungan APIP terdiri atas:

a) Kegiatan Pemberian Keyakinan (Assurance Activities), terdiri atas:
    1) Audit, meliputi:
        (a) Audit Keuangan, terdiri dari Audit keuangan dan Audit terhadap aspek keuangan tertentu
        (b) Audit Kinerja
        (c) Audit dengan tujuan tertentu
    2) Evaluasi;

3) Reviu;
4) Pemantauan.

b) Kegiatan Pengawasan lainnya dan kegiatan yang tidak memberikan penjaminan kualitas, antara lain:
1) Konsultasi;
2) Sosialisasi;
3) Asistensi.

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat adalah langkah penting dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memutuskan apakah program atau kegiatan tersebut layak untuk direncanakan, diimplementasikan dan dianggarkan/ didanai dari hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat maupun dari hasil pengumpulan informasi Inspektorat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

Untuk pembinaan dan pengawasaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2017 dan ditindaklanjuti setiap tahun dalam Permendagri tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dimana didalamnya menjelaskan mengenai fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut usulan program dan kegiatan dapat terlihat dari tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4. (Tabel T-C.32.)
Usulan Program dan Kegiatan
dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten kepulauan Selayar

Nama Perangkat Daerah: Inspektorat Daerah

No.	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Besaran/ Volume	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**		**Persentase Capaian Kinerja (%)**	**Persentase**	**91%**	
			Persentase Capaian Kinerja Keuangan (%)	**Persentase**	**71,51%**	
1.1	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Kepulauan Selayar**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun**	**Persentase**	**100%**	
1.1.1	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	
1.1.2	*Koordinasi dan Peyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	
1.1.3	*Koordinasi dan Peyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	
1.1.4	*Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD*	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	
1.1.5	*Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD*	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	
1.1.6	*Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	

No.	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Besaran/ Volume	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.1.7	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	
1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Kepulauan Selayar**	**Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat Daerah**	**Persentase**	**100%**	
1.2.1	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	50	
1.2.2	*Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	
1.3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Kepulauan Selayar**	**Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat Daerah**	**Persentase**	**100%**	
1.3.1	*Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	50	Sebagai Identitas dari Tim Pengawas
1.3.2	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarakn Tugas dan Fungsi*	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	40	
1.3.3	*Bimbingan Teknik Implemetasi Peraturan Perundang-Undangan*	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	50	
1.4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Kepulauan Selayar**	**Presentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan**	**Persentase**	**100%**	

No.	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Besaran/ Volume	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.4.1	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	
1.4.2	*Pengadaan Mebel*	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10	
1.4.3	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	45	
1.5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Kepulauan Selayar**	**Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase**	**100%**	
1.5.1	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	
1.5.2	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	
1.6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Kepulauan Selayar**	**Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPBMD**	**Persentase**	**100%**	
1.6.1	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	18	
1.6.2	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	35	
1.6.3	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	3	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**		**Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Prioritas)**	**Level**	**Level 3**	

No.	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Besaran/ Volume	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.1	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Persentase Pengawasan Internal yang Terlaksana**	**Persentase**	**100%**	
2.1.1	*Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah*	*Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	115	
2.1.2	*Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah*	*Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	265	
2.1.3	*Reviu Laporan Kinerja*	*Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	28	
2.1.4	*Reviu Laporan Keuangan*	*Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	1	
2.1.5	*Pengawasan Desa*	*Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	220	
	Kerja Sama Pengawasan Internal	*Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan		
2.1.7	*Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP*	*Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	35	

No.	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Besaran/ Volume	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.2	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Persentase Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Terselenggara**	**Persentase**	**100%**	
2.2.1	*Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah*	*Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	8	
2.2.2	*Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu*	*Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	12	
3	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**		**Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**	**Nilai/Score**	**3,2**	
3.1	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Persentase Kebijakan Teknis yang Ditetapkan**	**Persentase**	**100%**	
3.1.1	*Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan*	*Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	16	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	*Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	0	
3.2	**Pendampingan dan Asistensi**	**Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Persentase Pelayanan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase**	**100%**	
3.2.1	*Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah*	*Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	45	

No.	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Besaran/ Volume	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.2.2	*Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi*	*Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	45	
3.2.3	*Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi*	*Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	5	
3.2.4	*Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas*	*Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	45	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

a. Telaahan terhadap Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

Dalam rangka mendukung misi Kementerian Dalam Negeri dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik. Inspektorat Jenderal memiliki visi yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun serta menjadi gambaran menyeluruh terkait tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Adapun visi Inspektorat Jenderal adalah :***"Menjadi konsultan dan katalisator tata kelola pemerintahan dalam negeri"***

Visi Inspektorat Jenderal dimaksud dilatarbelakangi oleh keinginan dari segenap pegawai dan komitmen yang kuat dari pimpinan Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean goverment*).

Hal tersebut juga memperhatikan tuntutan akan perubahan paradigma pengawasan. Dimana keinginan dan komitmen Inspektorat Jenderal untuk menjadi konsultan, yang tidak hanya mampu menyajikan temuan, namun juga melaksanakan penataan dan penyempurnaan sistem, struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan memberikan bimbingan atas kendala atau permasalahan yang dihadapi mitra kerja Inspektorat Jenderal. Serta untuk menjadi katalisator, yang mampu memberikan kebijakan pengawasan berupa perbaikan yang konstruktif kepada manajemen organisasi dan memberikan keteladanan bagi

mitra kerja Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas.

Secara umum, Inspektorat Jenderal berorientasi untuk memberikan kepuasan dan nilai tambah kepada mitra kerja Inspektorat Jenderal sebagai pelanggan (*customer satisfaction*).

Adapun misi Inspektorat Jenderal adalah:

1) Mewujudkan tata kelola melalui sistem pengendalian intern dan manajemen risiko;
2) Mewujudkan akuntabilitas melalui pengelolaan keuangan efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
3) Mewujudkan integritas melalui pencegahan dalam penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan Inspektorat Jenderal adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean goverment*) serta berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.

b. Telaahan terhadap Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Visi Kepala Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan Visi Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 adalah: **"Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter"**

Pencapaian Visi RPJMD Sulawesi Selatan ini diwujudkan dalam 5 misi :

1) Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi melayani dan Inovatif; (Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan yang responsive dan inklusif dengan berbasis pada inovasi).
2) Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan aksesibel; (Membangun infrastruktur dalam menguatkan

interkoneksivitas antar wilayah pertumbuhan ekonomi dan menjangkau lokasi pelosok dan terisolir).

3) Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif; (Mengembangkan dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru sesuai keunggulan komparatif wilayah).
4) Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter; (Memenuhi akses pendidikan berkualitas dan penguasaan iptek tanpa hambatan bagi seluruh warga, menjamin akses layanan kesehatan berkualitas tanpa hambatan bagi seluruh warga, serta mendorong pelestarian dan pemajuan kebudayaan daerah).
5) Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan; (Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk perekonomian rakyat serta melestarikan lingkungan hidup dan sumberdaya alam).

Hasil telaahan atas Renstra Inspektorat Provinsi Sul-Sel dan Kementerian Dalam Negeri dapat dapat disajikan dalam tabel 3.1., berupa hasil komparasi sasaran, sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Komparasi Capaian Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Terhadap Sasaran Inspektorat Daerah Provinsi dan Kementerian Dalam Negeri

No.	Sasaran pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten	Sasaran pada Renstra Inspektorat Daerah Provinsi	Sasaran pada Renstra Kemendagri
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semakin meningkatnya Pengetahuan, Kemampuan dan Profesionalisme Aparat Pengawasan	Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and good government) dilingkungan Kementerian Dalam Negeri
		Opini BPK-RI atas LKPD Prov. Sulsel	Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang baik dan pemerintahan yang berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
		Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Prov. Sulsel	Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang baik dan pemerintahan yang berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
		Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Aparat Pengawasan Eksternal (BPK-RI)	Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and good government) dilingkungan Kementerian Dalam Negeri
		Evaluasi Penetapan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada SKPD Provinsi	Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and good government) dilingkungan Kementerian Dalam Negeri
		Pendampingan Pencegahan Korupsi pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and good government) dilingkungan Kementerian Dalam Negeri
		Persentase Penanganan Pengaduan memenuhi syarat yang ditindaklanjuti sesuai kewenangan	Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang baik dan pemerintahan yang berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

Atas dasar telaahan sasaran jangka menengah Kementerian Dalam Negeri dan Provinsi Sulawesi Selatan. Faktor penghambat yang dapat mempengaruhi pelayanan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar antara lain:

a. Masih Kurangnya Sertifikasi yang berkaitan dengan kompetensi Bidang Pengawasan;
b. Belum seimbangnya rasio antara tenaga pengawasan dengan obyek pemeriksaan;
c. Masih kurangnya Bimbingan Teknis maupun diklat kompetensi baik bagi Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD).
d. Masih belum memadainya perangkat pendukung teknologi informasi dan alat bantu ukur yang berbasis teknologi untuk penunjang pelaksanaan pengawasan;
e. Masih belum memadainya sarana mobilitas pelaksanaan pengawasan;
f. Masih belum memadainya fasilitas dan sarana prasarana gedung dan kantor yang representatif.

Faktor Pendorong yang dapat mempengaruhi pelayanan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar antara lain:

a. Kebijakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean goverment*), dari Kementerian Dalam Negeri dan Provinsi Sul-Sel mendorong perbaikan pada pendekatan pengawasan yang dilakukan di lapangan;
b. Perbaikan kualitas pengatahuan aparatur pengawasan menjadi prioritas dengan adanya kebijakan peningkatan kapabilitas APIP;
c. Membaiknya kualitas aparatur pengawasan akan berdampak pada semakin membaiknya transparansi pengelolaan keuangan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan program perangkat daerah. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan perangkat daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupeten Kepulauan Selayar mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan bidang pengawasan pengelolaan Pemerintah Daerah. Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah menjadi landasan perumusan tujuan, dan sasaran rencana strategis perangkat daerah.

a. Tujuan

Tujuan merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai dalam 1 (satu) periode tertentu. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang muncul. Tujuan juga harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi yang dimiliki oleh Inspektorat.

Bertolak dari visi dan misi Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah ditetapkan serta untuk mengatasi isu-isu starategis yang telah dikemukakan maka ditetapkan tujuan, sebagai berikut:

Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan, maka Inspektorat mewujudkan misi ke-1 Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu **Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan**, maka tujuan pembangunan/pelayanan jangka menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah:

1) Meningkatkan Kapasitas Manajemen Pengawasan terhadap Kualitas Hasil Pengawasan dengan indikator tujuan yaitu Persentase Pencapaian Kualitas Hasil Pengawasan;
2) Mewujudkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan indikator tujuan yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

b. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur. Spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi Inspektorat, atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan.

Sasaran yang ditetapkan merupakan sasaran pada level eselon II, yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja sasaran yang digunakan merupakan *medium term outcome* atau *outcome* untuk jangka menengah, dengan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai yaitu:

1) Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan indikator sasaran yang ingin dicapai yaitu:
   a) Jumlah obyek pengawasan berkala yang diawasi;
   b) Jumlah aparatur yang mengikuti diklat (pembentukan/ penjenjangan dan teknis/substansi);
   c) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP yang ditindaklanjuti;
   d) Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI yang ditindaklanjuti;
   e) Persentase Permintaan Pemeriksaan/Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti;
   f) Persentase OPD yang mendapat penilaian Hasil Evaluasi SAKIP dengan Kategori "Baik".

2) Meningaktnya SKPD yang Bebas dari Korupsi, dengan indikator sasaran yang ingin dicapai yaitu:
    a) Jumlah regulasi/ kebijakan terkait pengawasan yang ditetapkan;
    b) Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP;
    c) Persentase OPD yang Ditetapkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
    d) Presentase pejabat yang telah menyampaikan LHKPN.
3) Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah, dengan indikator sasaran yang ingin dicapai yaitu:
    a) Nilai SAKIP Perangkat Daerah;
    b) Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan;
    c) Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Program perangkat daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan daerah disusun untuk menggambarkan keterkaitan program perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih. Perencanaan program perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan penjabaran visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, berbasis permasalahan serta isu strategis daerah, pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) dan SDGs, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan public dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Maka Program Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan

Selayar yang dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun ke depan, dan dengan sumber dana APBN/APBD, dirauikan berikut ini:

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program : Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program : Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kegiatan:
    1.1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
        1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
        2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
        3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA Perubahan SKPD
        4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
        5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
        6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
        7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
        1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
        2) Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
    1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
        1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
        2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarakn Tugas dan Fungsi
        3) Bimbingan Teknik Implemetasi Peraturan Perundang-Undangan

1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    2) Pengadaan Mebel
    3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

b. Program Penyelenggaraan Pengawasan, dengan kegiatan:
2.1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
    1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
    2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
    3) Reviu Laporan Kinerja
    4) Reviu Laporan Keuangan
    5) Pengawasan Desa
    6) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
2.2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
    1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
    2) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, dengan kegiatan:

3.1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

3.2. Pendampingan dan Asistensi

1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dijelaskan di atas diharapkan dapat menjawab tantangan dan tanggung jawab Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam memberikan keyakinan yang memadai (*assurance activities)* memberikan peringatan dini *(anti corruption activities),* meningkatkan kualitas *(consulting activities),* penyelenggaraan tugas dan fungsi intansi pemerintah.

Berikut ini disajikan rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 sesuai tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2 (Tabel T-C.33.)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Kepulauan Selayar

Nama Perangkat Daerah: Inspektorat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*) dam Kegiatan (*Output*)	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**					**12.701.091.000**				**12.955.112.820**
6	**01**				**INSPEKTORAT DAERAH**					**12.701.091.000**				**12.955.112.820**
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Capaian Kinerja Inspektorat Daerah (%)**	**Persentase**		**71,51%**	**7.792.034.559**			**71,51%**	**7.947.875.250**
						Persentase Capaian Keuangan Inspektorat Daerah (%)	**Persentese**		**91,00%**				**91,00%**	
6	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran,dan evaluasi kinerja yang diselesaikan tepat waktu**	**Persentese**	**Kab. Kepulauan Selayar**	**100%**	**30.200.000**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**		**100%**	**30.804.000**
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	3	6.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3	6.324.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*) dam Kegiatan (*Output*)	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
6	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Peyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	1	3.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	3.570.000
6	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Peyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	1	3.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	3.570.000
6	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	1	3.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	3.570.000
6	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	1	3.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	3.570.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*) dam Kegiatan (*Output*)	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	12	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12	5.100.000
6	01	01	2.02	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	3	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3	5.100.000
6	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen/laporan pengelolaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu**	**Persentese**	**Kab. Kepulauan Selayar**	**100%**	**4.984.787.259**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**		**100%**	**5.084.483.004**
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	50	4.980.787.259	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50	5.080.403.004

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*) dam Kegiatan (*Output*)	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
6	01	01	2.02	05	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	1	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	4.080.000
6	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ASN yang memiliki predikat kinerja sangat baik**	**Persentese**	**Kab. Kepulauan Selayar**	**100%**	**1.104.798.000**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**		**100%**	**1.126.893.960**
6	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	50	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50	51.000.000
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	30	964.310.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30	983.596.200

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*) dam Kegiatan (*Output*)	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
6	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknik Implemetasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	40	90.488.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		40	92.297.760
6	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase dokumen/laporan pengelolaan barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu**	**Persentese**	**Kab. Kepulauan Selayar**	**100%**	**347.352.800**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**		**100%**	**354.299.856**
6	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	2	113.991.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2	116.270.820
6	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	10	57.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10	58.548.000
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	18	175.961.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		18	179.481.036

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*) dam Kegiatan (*Output*)	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
6	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persentese**	**Kab. Kepulauan Selayar**	**100%**	**864.884.200**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**		**100%**	**882.181.884**
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	3	145.297.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3	148.202.940
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	1	719.587.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	733.978.944
6	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD dalam kondisi baik**	**Persentese**	**Kab. Kepulauan Selayar**	**100%**	**460.012.300**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**		**100%**	**469.212.546**
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	20	266.630.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20	271.962.600

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*) dam Kegiatan (*Output*)	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	30	37.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30	38.301.000
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	*Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng*	5	155.832.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3	158.948.946
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Prioritas)**	**Level**		**Level 3+**	**4.084.144.341**			**Level 3+**	**4.165.827.228**
6	**01**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Persentase Objek Pemeriksaan (Obrik) yang diawasi**	**Persentese**	**Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**100%**	**3.304.448.941**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**		**100%**	**3.370.537.920**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*) dam Kegiatan (*Output*)	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	*Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	115	660.843.441	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		120	674.060.310
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	*Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	265	852.947.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		270	870.005.940
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	*Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	28	187.569.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		28	191.320.380
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	*Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	1	37.113.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	37.855.260

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*) dam Kegiatan (*Output*)	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	*Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	220	1.255.976.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		220	1.281.096.030
6	01	02	2.01	06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	*Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*		-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			-
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	*Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	35	310.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		40	316.200.000
6	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Persentase Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Terselenggara**	**Persentese**	**Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**100%**	**779.695.400**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**		**100%**	**795.289.308**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*) dam Kegiatan (*Output*)	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	*Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	8	285.150.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10	290.853.000
6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	*Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	10	494.545.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15	504.436.308
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**	**Nilai/Score**		**3,4**	**824.912.100**			**3,5**	**841.410.342**
6	**01**	**03**	**2**		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Persentase Kebijakan Teknis yang Ditetapkan**	**Persentese**	**Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**100%**	**94.820.000**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**		**100%**	**96.716.400**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*) dam Kegiatan (*Output*)	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
6	01	03	2,01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	*Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	5	94.820.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5	96.716.400
6	01	03	2,01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	*Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	0	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	-
6	**01**	**03**	**2**		**Pendampingan dan Asistensi**	**Persentase Pelayanan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentese**	**Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**100%**	**730.092.100**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**		**100%**	**744.693.942**
6	01	03	2,02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	*Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	45	259.491.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		45	264.681.228

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*) dam Kegiatan (*Output*)	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
6	01	03	2,02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	*Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	45	37.428.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		45	38.176.560
6	01	03	2,02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	*Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	5	293.740.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5	299.615.514
6	01	03	2,02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	*Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	45	139.432.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		45	142.220.640
										12.701.091.000,00				**12.955.112.820,00**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025, program, kegiatan dan subkegiatan dikategorikan kedalam Program/Kegiatan/Subkegiatan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pembinaan serta Peningkatan Kualitas Aparat Pengawasan.

Rencana kerja Inspektorat Daerah disusun untuk menggambarkan keterkaitan program perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih. Perencanaan perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan penjabaran visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, berbasis permasalahan serta isu strategis daerah, pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) dan SDGs, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan public dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Berikut disajikan rencana kerja yang diuraikan dalam program kegiatan, dan sub kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar beserta pendanaannya dalam tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan
Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						INSPEKTORAT DAERAH						12.701.091.000,00							11.413.977.162,00	
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						12.701.091.000,00							11.413.977.162,00	
	6	01				INSPEKTORAT DAERAH						12.701.091.000,00							11.413.977.162,00	
1	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja (%) Persentase Capaian Keuangan (%)	-			71,51 Persen 91,00 Persen	7.792.034.559,00						-	7.330.754.116,00	
	6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran,dan evaluasi kinerja yang diselesaikan tepat waktu	-			100 Persen	30.200.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	Pegawai Inspektorat Daerah	-	35.200.000,00	
	6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	6.200.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	Pegawai Inspektorat Daerah		7.200.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	Pegawai Inspektorat Daerah		4.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	Pegawai Inspektorat Daerah		4.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	Pegawai Inspektorat Daerah		4.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	Pegawai Inspektorat Daerah		4.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	Pegawai Inspektorat Daerah		5.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	5.000.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	Pegawai Inspektorat Daerah		5.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan pengelolaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	-			100 Persen	4.984.787.259,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	Pegawai Inspektorat Daerah	-	5.088.879.706,00	
	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	4.980.787.259,00	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	Pegawai Inspektorat Daerah		5.084.879.706,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	4.000.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	Pegawai Inspektorat Daerah		4.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki predikat kinerja sangat baik	-			100 Persen	1.104.798.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	Pegawai Inspektorat Daerah	-	551.508.506,00	
	6	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				50 Paket	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	Pegawai Inspektorat Daerah		50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	964.310.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	Pegawai Inspektorat Daerah		400.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	90.488.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	Pegawai Inspektorat Daerah		101.508.506,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase dokumen/laporan pengelolaan barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu	-			100 Persen	347.352.800,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	Pegawai Inspektorat Daerah	-	568.810.000,00	
	6	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	113.991.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	Pegawai Inspektorat Daerah		302.710.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	57.400.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	Pegawai Inspektorat Daerah		80.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				18 Unit	175.961.800,00	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	Pegawai Inspektorat Daerah		186.100.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 Persen	864.884.200,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	Pegawai Inspektorat Daerah	-	792.450.294,00	
	6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	145.297.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	Pegawai Inspektorat Daerah		150.297.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	719.587.200,00	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	Pegawai Inspektorat Daerah		642.153.294,00	INSPEKTORAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	-			100 Persen	460.012.300,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	Pegawai Inspektorat Daerah	-	293.905.610,00	
	6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	266.630.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	Pegawai Inspektorat Daerah		156.376.493,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	37.550.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	Pegawai Inspektorat Daerah		42.669.117,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	155.832.300,00	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	Pegawai Inspektorat Daerah		94.860.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
2	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	-			3+ Level	4.084.144.341,00							-	3.566.967.490,00	
	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Objek Pemeriksaan (Obrik) yang diawasi	-			100 Persen	3.304.448.941,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	Seluruh Pegawai Lingkup Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar	-	2.842.197.441,00	
	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				115 Laporan	660.843.441,00	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	Seluruh Pegawai Lingkup Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar		670.843.441,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				265 Laporan	852.947.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	Seluruh Pegawai Lingkup Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar		862.947.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja														
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				28 Laporan	187.569.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	Seluruh Pegawai Lingkup Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar		197.569.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	37.113.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	Seluruh Pegawai Lingkup Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar		37.113.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa														
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				220 Laporan	1.255.976.500,00	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	Seluruh Pegawai Lingkup Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar		758.725.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				35 Dokumen	310.000.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	Seluruh Pegawai Lingkup Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar		315.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang terselenggara	-			100 Persen	779.695.400,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	Seluruh Pegawai Lingkup Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar	-	724.770.049,00	
	6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														
							Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				8 Laporan	285.150.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	Seluruh Pegawai Lingkup Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar		200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				12 Laporan	494.545.400,00	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	Seluruh Pegawai Lingkup Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar		524.770.049,00	INSPEKTORAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	-			3,4 Nilai	824.912.100,00						-	516.255.556,00	
	6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kebijakan teknis yang ditetapkan	-			100 Persen	94.820.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	Seluruh Pegawai Lingkup Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar	-	55.000.000,00	
	6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan														
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				5 Rekomendasi	94.820.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	Seluruh Pegawai Lingkup Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar		55.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	-	-			-	730.092.100,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	-	-	461.255.556,00	
	6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				45 perangkat daerah	259.491.400,00	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	-		114.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				45 perangkat daerah	37.428.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	-		37.428.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				5 Kegiatan	293.740.700,00	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	-		183.827.556,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				45 perangkat daerah	139.432.000,00	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif	-		126.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	J U M L A H											**12.701.091.000,00**							**11.413.977.162,00**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Daerah merupakan dokumen perencanaan Inspektorat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan Akhir (Rankhir) Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025, sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Rencana Kerja Tahunan ini digunakan dalam membuat rencana operasional kegiatan sebagai komitmen Pimpinan untuk menyediakan sumber daya serta proses penganggaran yang selanjutnya juga digunakan untuk *Service Agreement* atau Komitmen Kinerja ataupun *Performance Agreement* yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar untuk pemantauan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan di Tahun 2025.

Untuk menjamin agar kegiatan berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran maka sebuah sistem perencanaan yang baik merupakan syarat mutlak untuk tercapainya tujuan. Rencana kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan bagian dari rencana kerja tahunan yang menggambarkan prioritas pembangunan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar dan dijabarkan kedalam program dan kegiatan pokok pembangunan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan.

Adapun prioritas pembangunan tahunan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan.
2. Memiliki sasaran-sasaran dan indikator kinerja yang terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya.
3. Kegiatan tersebut sifatnya mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan.
4. Realistis untuk dilaksanakan dan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2025 yang berkesesuaian dengan RKPD Tahun 2025 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) yang selanjutnya menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) dengan maksud:

1. Pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan efektif, efisien serta terkoordinasi sesuai dengan tujuan dan sasaran berikut berbagai indikator yang telah ditetapkan.
2. Mampu memberikan arahan bagi pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan di Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Akhirnya, indikator keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja akan sangat tergantung kepada komitmen dan konsistensi para pelaksana program dan kegiatan sehingga sasaran organisasi yang telah ditetapkan bersama dapat dicapai dengan sebaik-baiknya.

Dengan disusunnya Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan /pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025.

Benteng, 31 Juli 2024

INSPEKTUR DAERAH,

IRWAN BASO, S.STP.
Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b
NIP : 19800422 199912 1 003